

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK KARENA
ISTRI MENUNTUT NAFKAH MELEBIHI KEMAMPUAN
SUAMI**

(Studi Putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

**Fatimatus Suhro
NIM: C71214045**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimatus Suhro

NIM : C71214045

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum
Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan
Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai
Talak Karena Istri Menuntut Nafkah
Melebihi Kemampuan Suami
(Studi Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,




Fatimatus Suhro
NIM. C71214045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Karena Istri Menuntut Nafkah Melebihi Kemampuan Suami (Studi Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)”. yang ditulis oleh Fatimatus Suhro NIM. C71214045 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Mei 2018
Pembimbing,



Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 19780310200511004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatus Suhro NIM. C71214045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 19780310200511004

Penguji II

Drs. H. M. Zayin Chudlari, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji III

Moh. Hatta, S.Ag., MHI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Hj. Ifa Mutitul Choirah, SH., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Surabaya, 4 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatimatus Suhro
NIM : C71214045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fatiemz10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK KARENA ISTRI
MENUNTUT NAFKAH MELEBIHI KEMAMPUAN SUAMI (Studi putusan
Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis


(Fatimatus Suhro)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Karena Istri Menuntut Nafkah Melebihi Kemampuan Suami (Studi Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami.

Data penelitian ini merupakan studi pustaka yang dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi dan selanjutnya data yang sudah terkumpul di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan polapikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang mengabulkan permohonan pemohon karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami telah menyebabkan antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis Hakim memutus berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan vide pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f). selain itu dalam Hukum Islam istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami menjadi sebab terjadinya *syiqāq*. *Syiqāq* adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin dapat didamaikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan Kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berperan untuk menegakkan hukum hendaknya dalam memberikan putusan lebih memperhatikan dan memfokuskan pada alasan perceraian yang diajukan oleh para pencari keadilan dan mencari penyebab terjadinya perceraian secara mendalam dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikannya, Agar di kemudian hari tetap terus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan untuk kemaslahatan umat. Dan kepada para pihak yang akan melangsungkan pernikahan untuk lebih memahami dan mengerti kepribadian calon pasangannya agar ketika sudah terikat dalam sebuah ikatan pernikahan masing-masing pihak bisa saling memahami dan menghargai sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis dan bahagia.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
IZIN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	21
A. Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perceraian.....	21
2. Dasar Hukum Perceraian.....	23
3. Alasan-alasan Perceraian.....	23

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”⁴

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Ed.1, Cet 1, (Jakarta : Prenada media, 2006), 35.

⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an A-Hikmah dan Terjemahannya*...., 423.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2010), 114.

Selain itu pelaksanaan perkawinan perlu adanya suatu pencatatan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian suatu perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan selain merupakan akad-suci, perkawinan juga mengandung hubungan keperdataan.⁶

Ketika seorang laki-laki (suami) sudah mengikat seorang perempuan dalam sebuah ikatan janji perkawinan, maka mulai saat itu suatu tanggung jawab besar yang akan diemban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Seperti yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah apabila telah jatuh akad nikah yang sah (sesuai dengan ketentuan fikih), maka wajib bagi keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban didalam perkawinan, yaitu

[illegible]

kewajiban suami atas isterinya, kewajiban isteri atas suaminya dan kewajiban bersama.⁷

Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberikan belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami-istri masih terjalin dan istri tidak durhaka atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.

Dalam UU No. 1 Tahun. 1974 pasal 34 ayat 1 menjabarkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Keterangan di atas jelas bahwa suami dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sesuai dengan firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik”.(QS. Al-Baqarah :233).⁸

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, (Beirut : Dar al-fikri, 2006), 531.

⁸ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an A-Hikmah dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2012), 37.

nafkah lebih dari kemampuan suaminya, yang di maksud melebihi kemampuan suami ialah suami sudah berusaha keras sekuat tenaga untuk mencukupi nafkah keluarga akan tetapi istri-nya masih belum juga merasa tercukupi dengan penghasilan yang di dapat oeh suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada istri.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di perlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini

Sedangkan Menurut golongan Syafi'i dalam penetapan jumlah nafkah bukan di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhartikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud¹⁰.

Suami istri harus bisa menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga dengan saling memberikan kasih sayang dan saling mengerti satu sama lain untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Apabila istri masih kurang atas nafkah suaminya padahal suaminya sudah berusaha untuk mencukupinya, maka istri harus bisa memahami bahwasannya suami tersebut sudah berusaha keras untuk mencukupi keluarganya.

Dalam sebuah perkawinan terdapat satu prinsip yaitu menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya karena sebuah perkawinan bukan hanya perbuatan perdata semata tetapi juga sebagai ikatan yang suci yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, sehingga harus ada usaha yang dilakukan agar hubungan itu terus berlanjut. Tetapi jika semua

¹⁰ *Ibid*, 84

ada diantara mereka dan sulit dipulihkan, tetapi yang ada kemudian hanya benci membenci, terbukalah pintu yang memberi hak talak kepada suami.¹¹

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.¹²

Dalam hal ini untuk dapat mengajukan perceraian ke pengadilan, harus terpenuhi dulu alasan-alasan perceraian yang dibenarkan. Secara jelas dalam Pasal 39 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 vide pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹³

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 terdapat penambahan 2 (dua) alasan yang disesuaikan dengan hukum Islam, yaitu :

¹¹ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Per ikatan*, Cet.13, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Lihat juga Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Undang - undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1981), 118-119.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 2011.

¹³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, dengan tambahan Undang-undang Agraria dan Undang-undang Perkawinan. Pasal 19*, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2004), 566-567.

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tidak dijelaskan secara rinci tentang jatuhnya talak dikarenakan istri sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh

[illegible]

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Pengertian perkawinan
2. Perkawinan menurut Undang-Undang
3. Perkawinan menurut Hukum Islam
4. Hak dan kewajiban antara suami istri
5. Pengertian perceraian
6. Faktor-faktor penyebab perceraian
7. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami

- Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami
- Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami.

Masalah yang telah dibatasi di atas berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Malang perkara Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. dapat dirumuskan sebagai berikut :

- [illegible]

¹⁵ Hulaifatul Hamimah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang No. 2193/Pdt. G/2012/PA.Mlg. Tentang Cerai Gugat Karena Tuntutan Nafkah” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

- [illegible]

3. Penelitian oleh Moh. Hafid Nasrullah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap putusan PA Lamongan Nomor.2360/Pdt.G/2010/PA Lmg tentang perceraian karena suami Mafqud (Ghaib)”, pada tahun 2012. Skripsi tersebut memfokuskan pembahasannya pada perginya suami dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan dalam waktu yang lama. Sehingga menimbulkan permasalahan keharmonisan dalam berumah tangga yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian antara keduanya.¹⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama berkaitan dengan perceraian sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada faktor istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami.

Sehubungan dengan apa yang sudah menjadi suatu rumusan masalah penelitian ini, maka ada beberapa tujuan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami.

¹⁶ Abdul Malik, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik NO. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain (PIL)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

¹⁷ Moh. Hafid Nasrullah, "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Lamongan tentang Perceraian karena suami Mafqud" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Dengan tercapainya tujuan tersebut, penulis berharap penelitian ini bisa berkontribusi dalam dua aspek yaitu :

Dari hasil penelitian ini dapat menambah pemikiran keilmuan yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kekeluargaan khususnya dalam perceraian Islam.

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pertimbangan bagi para hakim untuk memberi putusan yang layak kepada para pencari keadilan dalam menghukumi status talak dan implikasinya. Di samping itu juga sebagai acuan dan pertimbangan, khususnya mahasiswa dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya tentang masalah yang sama atau serupa.

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan skripsi ini, maka disini ada

- Dari definisi operasional tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian adalah menjelaskan tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak karena Istri Menuntut Nafkah Melebihi Kemampuan Suami (studi putusan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kualitatif, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data yang dikumpulkan

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.¹⁹

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dimana dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.²⁰ Dalam hal ini dokumen yg terpenting adalah putusan Pengadilan Agama Malang Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg.

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

Supaya pembahasan dari penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

[illegible]

Bab Ketiga, Menjelaskan gambaran umum dan sejarah singkat Pengadilan Agama Malang dan dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani perkara cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami Putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg.

Bab Keempat, Analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam kasus cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami Putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg.

Bab Kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

A. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja) 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “berceraian” berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).¹

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diatas.

“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang di gunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.²

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Ed.1.Cet.1, (Jakarta : Prenada media, 2006), 203.

Bila ternyata pernikahan tidak dapat dilanjutkan karena sebab sebab yang cukup beralasan, haruslah ada suatu jalan keluar, membiarkan kedua belah pihak tidak boleh memutuskan pernikahan mereka padahal sudah nyata pernikahan mereka tidak dapat di persatukan lagi adalah suatu penyiksaan, jalan keluar yang terbaik yang dimaksud adalah perceraian.⁴

Perceraian menurut Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud putusnya perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975, perceraian yaitu yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya

4 R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Belanda*, (Surabaya: Airlangga University Press 1996), 30.

Dalam undang-undang Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai 41. Pada pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : a) kematian b) perceraian, dan c) atas putus pengadilan.

3. Alasan-alasan Perceraian

Alasan perceraian dapat dijumpai dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

Dalam pasal 19 dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat di pakai untuk mengajukan cerai ada enam poin yang harus diperhatikan. Diantara

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 18.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 4, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 206.

Untuk alasan perceraian ini, dalam KHI juga menjelaskan hal yang sama tentang perceraian. Hanya saja di dalam KHI terdapat dua point tambahan dalam penyempurnaanya, yaitu bila suami melanggar taklik talak yang sudah disepakati sebelum menikah dan salah satu pihak berpindah dari agama Islam (murtad) yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.

Perceraian menurut undang-undang perkawinan ada dua bentuk yaitu :

Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan akibat tersebut, yaitu terdapat dalam pasal 41 yang berisi tiga point, diantaranya : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan; bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

1. Pengertian dan Dasar Perceraian

Talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Talak diambil dari kata *Itlāk*, artinya

[illegible]

Perceraian dalam istilah ahli fiqih yang berasal dari bahasa arab yaitu kata “إِطْلَاقَ” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara' talak adalah :

Artinya : “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.¹²

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Talak adalah “Ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.

¹⁰ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 09.
¹¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 354.
¹² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet.1,jilid. 2, (al-Qahirah: Dar al-Fath Li al-I'lam al- 'Arabi, 2000), 155.

b. Dasar Hukum Perceraian

Adapun dasar dari diperbolehkannya talak, antara lain:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

¹³ Tihami Dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 229.

[illegible]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

2) Sunnah

Artinya : “Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: „Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza waJalla adalah talak”. (H. Abu Daud dan Ibnu Majah dan sanad yang sahih).¹⁷

¹⁷ Imam Hafiz, Abi Daud Sulaiman ibn al- Ash'ath al-sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Cct. 1, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 1998). 334.

menyebutkan adanya Nusyuz dari suami sesuai dengan ayat al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 128, yaitu:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Nisa’: 128).³²

Kemungkinan nushuz-nya seorang suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

3) Terjadinya perselisihan atau percekcoan antara suami dan istri
(*Shiqaq*).³³

Jika dua kemungkinan di atas menggambarkan salah satu pihak nushuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam percekcohan (*shiqaq*), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam hal ini al-Qur'an memberi petunjuk dalam surat al-Nisa' ayat 35, yaitu :

³² Ibid, 99.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ..., 272-273.

Dari ayat di atas jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakam (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan pada perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Ulama' sependapat bahwa mengirim juru damai itu diperbolehkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tanpa diketahui sebab-sebab perselisihan itu, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah. Kesepakatan ini didasarkan atas firman Allah yang telah disebutkan di atas.³⁵

Hal ini juga disebut dengan *fakhisyah*, yang mana menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 625.

Dalam hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut³⁷:

- Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, alasan-alasan perceraian itu adalah:

- Suami tidak memberi nafkah.
- Suami berbuat aniaya terhadap istri.
- Suami ghaib (berjauhan).
- Suami dihukum penjara.

c. Akibat Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa akibat dari perceraian dijelaskan dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 160, yaitu: Pasal 149 menjelaskan kewajiban suami setelah perceraian harus

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ..., 273-274.

³⁷ Ibid, 275.

C. Syarat-syarat Acara Verstek

Menurut M. Yahya Harahap³⁸, syarat sahnya penerapan acara verstek kepda tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

- ³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 383.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum tidak melawan hak.
5. Petitum beralasan.

[illegible]

c. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[illegible]

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

[illegible]

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh drs. H. Muhadjir, SH. Dan drs. Abu Amar, SH., dalam perkembanganya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suruso No. 1 Malang, Drs. Abu Amar, SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH.

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Saat ini, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan

[illegible]

Wilayah kota Malang meliputi beberapa kecamatan yang tiap-tiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan, antara lain :

1. Kecamatan Sukun terdiri dari 11 Desa
2. Kecamatan Klojen terdiri dari 11 Desa
3. Kecamatan Blimbing terdiri dari 11 Desa
4. Kecamatan Lowokwaru terdiri dari 12 Desa
5. Kecamatan Kedung Kandang terdiri dari 11 Desa
6. Kota batu Semua Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kota Batu.³

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

[illegible]

[illegible]

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 19 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah di daftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 2302/Pdt.G/2017/Mlg. Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan pada perkara cerai talak antara pemohon selaku suami yang saat itu berumur 41 tahun dan beragama Islam, pemohon merupakan karyawan swasta, dan berpendidikan SMA, pemohon semula bertempat tinggal di Kota Malang, dan sekarang tetap bertempat tinggal di Kota Malang. Melawan Termohon selaku istri berumur 32 tahun, dan beragama Islam, termohon merupakan ibu rumah tangga, dan pendidikan termohon adalah SMA, bertempat tinggal di Kota Malang.⁷

⁶ Ibid.

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg, 1.

Pemohon memaparkan keinginannya di surat permohonannya yang diantaranya berisikan agar hakim berkenan memberikan putusan mengabulkan permohonan cerai talak dan memberi izin terhadap pemohon untuk bisa mengucapkan ikrar talak pada termohon di hadapan sidang pengadilan agama Malang serta membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 28 Mei 2006 berdasarkan Akta Nikah Nomor :....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 29 Mei 2006. Setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Dali Selatan Kecamatan Sukun Kota Malang, setahun kemudian mereka pindah kerumah pemohon yang beralamat di Kota Malang selama kurang lebih 10 Tahun. Selama pernikahannya pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. Anak I berumur 11 tahun.
- b. Anak II berumur 7 tahun.

Awalnya kehidupan pemohon dan termohon berjalan harmonis Namun kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi Perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga pemohon dan termohon dimulai sejak bulan Mei tahun 2014 dengan beberapa sebab, karena termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh pemohon, padahal pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi

Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi termohon sering mebantak-bentak dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati serta termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon. Sehingga Puncak perselisihan diantara keduanya terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 yang berakibat perginya Termohon dari rumah dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya sendiri yang beralamat sebagaimana tersebut selama kurun waktu 2 bulan.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Hal yang melatar belakangi pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Agama Malang memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama malang dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Pertama termohon sering merasa kurang atas nafkah yang di berikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga dan yang kedua termohon keras kepala dan sering berkata kasar kepada pemohon, termohon juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat pemohon. Ketiga ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi termohon sering membentak-bentak pemohon dengan kata-kata yang menyakitkan hati, dan termohon sering meminta cerai kepada pemohon.⁸

[illegible]

Sampai pada akhirnya bulan oktober tahun 2017 pemohon pergi meninggalkan termohon dan bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Padahal termohon sudah diketahui tempat tinggalnya akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya. Sehingga pemohon membuktikan dalil permohonannya di hadapan Pengadilan dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi untuk dapat memenuhi syarat-syarat formil agar bisa bernilai sebagai alat bukti yang sah.

Maka dari itu tuntutan yang di kemukakan pemohon dengan berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan pemohon , Majelis hakim akhirnya mempertimbangkan tuntutan pemohon berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti lain adalah bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Setelah mendengar keterangan saksi 1 dan 2 sesuai dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 saksi 1 dan saksi 2 pemohon, terbukti kejadian tersebut sebagai berikut :

- Fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide asal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal ini juga telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”.

[illegible]

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);¹⁰

[illegible]

A. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Cerai Talak karena istri menuntut Nafkah Melebihi kemampuan suami (Studi Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)

Bahwa pada hari sidang pertama dan kedua sebagaimana yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR yaitu putusan yang di jatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum yang beralasan. Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Dalam pelaksanaan sidang selanjutnya termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan pemohon saat proses persidangan berlangsung, namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, majelis berpendapat bahwa pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya. Sehingga akhirnya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, dan P-2, serta saksi 1 dan saksi 2 yang selengkapny akan di pertimbangkan lebih lanjut.

Dalam fakta hukumnya rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang menjadi penyebabnya adalah karena termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah pemohon berikan, padahal pemohon sudah berusaha keras untuk menafkahi keluarga. Dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah rumah dan tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide asal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

yaitu: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal ini juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”.

Kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkara dan berlanjut dengan perpisahan selama kurang lebih 2 bulan, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan madlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, oleh karena itu Hakim juga mengutip Kaidah Hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang berbunyi:

وَقَدْ اخْتَارَ السَّلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعِدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلِ صَلَاحٍ
وَحَيْثُ تَصْبِغُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجَ صُورُهُ مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لَنْ إِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
بِالسَّجْنِ الْمَوْتِ ۖ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

[illegible]

Berdasarkan dasar hukum hakim yang telah di paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan tentang analisis putusan Nomor. 2303/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tentang Cerai Talak Karena Istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami berdasarkan hukum Islam.

Setelah penulis mengamati pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim untuk dijadikan dasar dalam menetapkan perkara perceraian sudah

Penulis juga menilai beberapa faktor lain penyebab terjadinya perceraian ini menurut Hukum Islam adalah *Syiqāq*, *Syiqāq* adalah adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan. Sejalan dengan permohonan cerai ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya untuk bisa dilanjutkan kembali hubungan keluarganya. Sehingga perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Ketentuan tentang *syiqāq* dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang

Majelis hakim juga mengutip Kaidah Hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang berbunyi:

وَقَدْ اخْتَارَ السَّلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعِدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلِ صَلَاحٍ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لَنْ إِسْتِمْرَارٍ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمَوْتِ بِدَوْنِ ظُلْمٍ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya :“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Sehingga permohonan pemohon terhadap Termohon dengan alasan tersebut di atas cukup beralasan hukum, dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan.

Pada dasarnya dikabulkannya permohonan cerai talak pada kasus istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami, oleh Hakim Pengadilan

Agama Malang bukan murni disebabkan oleh istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami, tetapi terlebih karena telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa diharapkan lagi keharmonisanya dan kondisi yang terakhir inilah yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagai alasan untuk mengajukan cerai talak.

Maka penulis menilai bahwa sesungguhnya putusan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang karena dasar pertimbangan hukumnya mengacu pada pertimbangan terakhir ini, jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hukum Hakim menerima cerai talak itu tidak murni karena sebab alasan permohonan yang tercantum dalam posita tetapi lebih didasarkan kepada akibat sebab.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan maka hasil penelitian ini bisa disimpulkan antara lain :

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak dalam putusan Nomor. 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. yaitu Adanya alasan karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami telah menyebabkan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, fakta hukumnya telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide asal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan suami karena tidak bisa di damaikan lagi.
2. Analisis hukum Islam terhadap Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak putusan Nomor. 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan vide pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 116 huruf (f) telah sesuai dengan hukum Islam, karena meskipun perceraian

B. Saran

1. Kepada pengadilan agama sebagai lembaga yang berperan untuk menegakkan hukum hendaknya dalam memberikan putusan lebih memperhatikan dan memfokuskan pada alasan perceraian yang diajukan oleh para pencari keadilan dan mencari penyebab terjadinya perceraian secara mendalam dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikannya. Agar dikemudian hari tetap terus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan untuk kemaslahatan umat.
2. Kepada para pihak yang akan melangsungkan pernikahan untuk lebih memahami dan mengerti kepribadian calon pasangannya agar ketika sudah terikat dalam sebuah ikatan pernikahan masing-masing pihak bisa saling memahami dan menghargai sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam, pasal 2*. Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Zainal. Dan Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung : CV PustakaSetia, 2007.
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika, 2013
- Al-Zuhaili,Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuh*. Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta :Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 4, Jakarta :Pustaka Pelajar, 2003.
- Bakri A. Rahmandan Ahmad Sukarja. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1981.
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Hafiz, Imam, Abi Daud Sulaiman ibn al- Ash'ath al-sajastani al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Cet. 1. Beirut : Dar IbnHazm, 1998.
- Haharap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamimah, Hulaifatul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang No. 2193/Pdt. G/2012/PA.Mlg. Tentang Cerai Gugat Karena Tuntutan Nafkah” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an Al-Hikmah dan Terjemahannya*. Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2012.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Per ikatan*. Cet.13. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia: Indonesia, 1985.

- Malik, Abdul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik NO.0181/Pdt.G/2013/PA.Gs. Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain (PIL)” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Nasrullah, Moh. Hafid, “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Lamongan tentang Perceraian karena suami Mafqud” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Belanda*. Surabaya: Airlangga University Press 1996.
- Profil Pengadilan Agama Malang, dalam <http://www.pamalang.kota.go.id/index.php/profil/tentang/visi-misi-2>.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum perkawinan Islam*. Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid. 2, Jakarta: PustakaAmani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *FikihSunnah*. Juz II. Beirut : Dar al-fikri, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Ed.1.Cet.I*. Jakarta :Prenada media, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty, 1997.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, dengan tambahan Undang-undang Agraria dan Undang-undang Perkawinan. pasal 19*. Jakarta :PT.Pradnya Paramita, 2004
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tihami Dan SobariSahrani. *Fikih Munakahat, kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

